

FORMULIR PERMOHONAN

KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (KRK)

(Mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diketik)

Sleman :

Nomor :

Lamp :

Perihal : Permohonan KRK

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman

di Sleman

Kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang di Kabupaten Sleman, dengan data sebagai berikut :

I. DATA PEMOHON

A. PERORANGAN / BADAN

1. Nama /Direktur /Pengurus :
2. NIK :
3. Alamat Lengkap :
4. No. Telp/HP/WA :
5. Jabatan :
6. Badan/PT/Kop :
7. Nomor dan Tanggal :
 - a. Akta Pendirian :
 - b. Akta Perubahan Terakhir :
8. Kedudukan Badan di :
9. NIB OSS RBA :
10. NPWP :
11. NPWP.Daerah :
12. Email aktif :

II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN

1. Data Kegiatan Usaha
 - 1) Kegiatan :
 - 2) Nama Usaha (Branded)
 - 3) KBLI :
 - 4) Modal Usaha :
2. Koordinat/Polygon dan KMZ :
3. Luas Tanah dipergunakan.....M²

4. Lokasi :
 - a. Nomor/Jalan :
 - b. Padukuhan :,RT:.....,RW:.....
 - c. Kalurahan :
 - d. Kapanewon :
5. Bukti Hak Atas Tanah Yang Dipergunakan
 - a. Status & nomor hak atas tanah;
 - 1) SHM/HGB/Hak Pakai/Letter C/Model D/Model E/SG*)
 - Nomor :
 - Surat Ukur/G.Situasi :
 - 2) SHM/HGB/Hak Pakai/Letter C/Model D/Model E/SG*)
 - Nomor :
 - Surat Ukur/G.Situasi :

(Diisi Sesuai Dengan jumlah Bukti Hak Atas Tanah Yang Dipergunakan)
 - b. Status penggunaan : Milik sendiri/sewa/kerjasama/pinjam pakai*)
 - c. Kondisi tanah : sawah/tegal/darat/pekarangan/*)
6. Batas Tanah
 - 1) Utara (nama pemilik tanah)
 - 2) Selatan..... (nama pemilik tanah)
 - 3) Barat (nama pemilik tanah)
 - 4) Timur..... (nama pemilik tanah)

III. LAMPIRAN PERSYARATAN UPLOAD

1. KTP Elektronik pemohon/Penanggungjawab;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
3. Akta Badan Usaha,(apabila pemohon berbentuk badan)
4. Dokumen/Bukti hak atas tanah;
5. Surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah
6. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan beserta surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun terakhir,
7. Polygon dan atau bentuk KMZ dari Google Earth serta denah lokasi lokasinya.
8. Gambar site tanah sesuai dengan bukti hak atas tanah yang akan digunakan untuk rencana kegiatan.
9. Nomor Induk Berusaha dari OSS RBA;
10. surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin, dan tanah yang dimohonkan izin tidak dalam sengketa (terlampir)
11. Pendaftaran lewat : **perizinan.slemankab.go.id** **Berkas permohonan scan dan diupload sesuai aslinya.** (bukan hasil foto hp, tidak diperkecil/diperbesar)

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

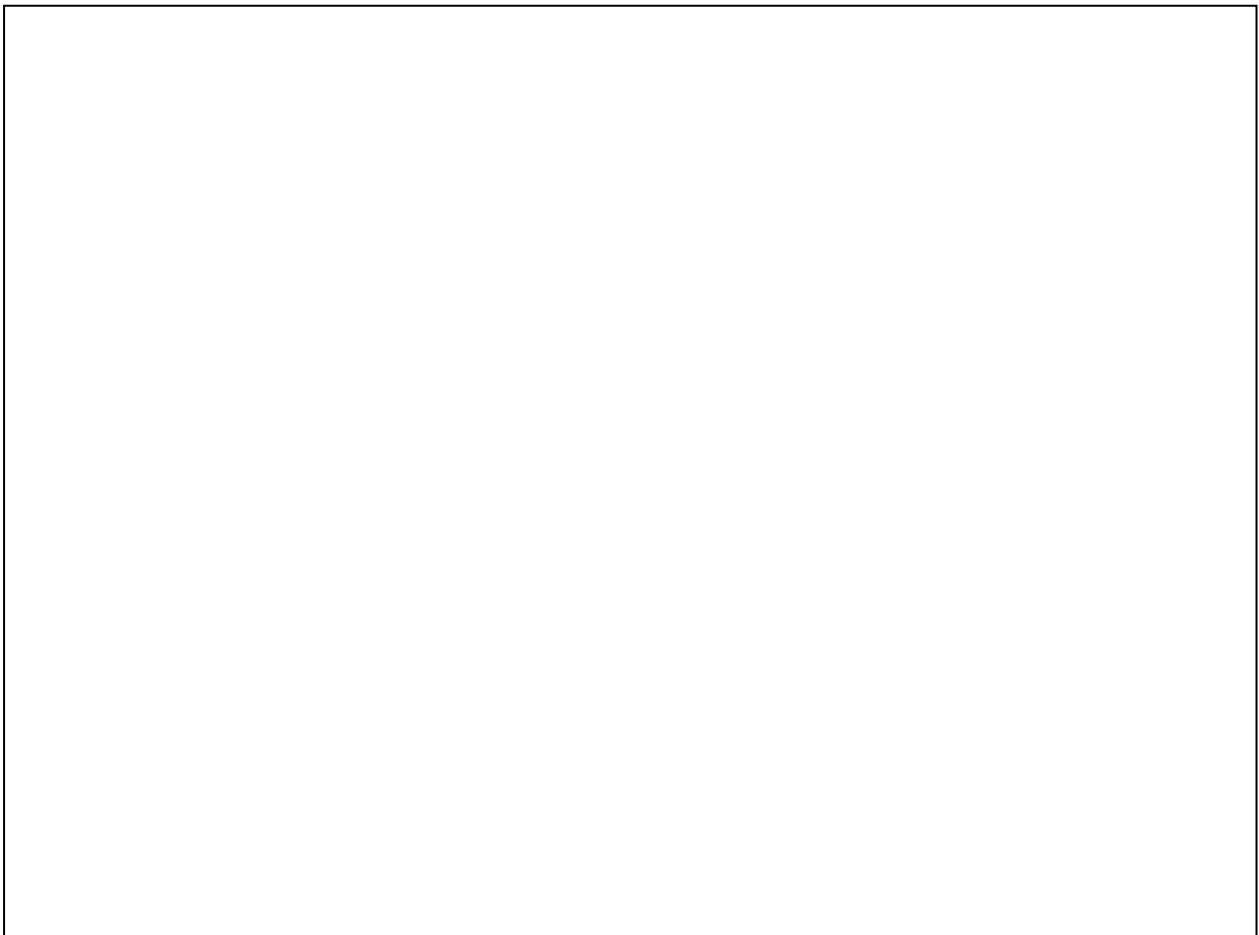
DENAH LOKASI

(Menunjukkan akses dari jalan utama dan tanda/ciri terdekat dari lokasi)



SITE TANAH

(apabila bidang tanah yang dimohonkan lebih dari satu)



PAKTA INTEGRITAS
PENGURUSAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SLEMAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama :
Jabatan dalam lembaga/ institusi :
Nama lembaga/ institusi :
Alamat :

Adalah benar merupakan pribadi/ pimpinan dari pribadi/lembaga/institusi/perusahaan tersebut diatas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/lembaga/institusi/perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPTSP Kabupaten Sleman, saya menyatakan bersedia untuk:

1. Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada petugas/ pejabat DPMPTSP Kabupaten Sleman, segala bentuk pemberian/ gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Kabupaten Sleman;
2. Tidak mempergunakan jasa perantara/ calo dalam hal pengurusan perizinan;
3. Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Kabupaten Sleman dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
5. Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya;
6. Apabila saya tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan, saya bersedia menerima pembinaan dan pengawasan serta sanksi dari pejabat yang berwenang.
7. Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi, lembaga/ institusi/ perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Saya yang membuat
pernyataan, Pemohon

Meterai Rp 10.000,-
Stempel Perusahaan

.....